Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019

The Political Law of Corruption Handling by Corruption Eradication Commission after The Passing of Law No. 19 of 2019

Nanci Yosepin Simbolon*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

*Corresponding Email: nancisimbolon123@gmail.com

Abstrak

Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materiil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabene melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KPK, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.

Abstract

Corruption has hampered the government system running well, so that it will have an impact on the development and welfare of the community. The passing of Law No. 19 of 2019 has given a new direction in combating corruption in Indonesia. This study focuses the study on two issues, namely, the legal politics of corruption eradication by the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019 and regarding the current obstacles of the Corruption Eradication Commission in handling corruption cases in Indonesia. This research uses the normative legal research method. The research results show that the Political Law of Corruption Eradication by the Corruption Eradication Commission Post the enactment of Law no. 19 of 2019 is to conduct a material test of Law No. 19 of 2019 to the Constitutional Court as a form of resistance from the public (community) so that Law No. 19 of 2019 whose notes weaken the function of the KPK. In addition, the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out actions to tackle corruption cases in Indonesia today not only prioritizes preventive efforts but also repressively remains the focus of law enforcement by the KPK. The current obstacles of the Corruption Eradication Commission in handling corruption cases in Indonesia can now be divided into two namely internal and external factors. Internal factors are based on the weakening of the position, function and authority of the KPK due to the passing of Law No. 19 of 2019. External factors are influenced by the political influence of government power, and the influence of the culture of the State Civil Apparatus and Public Officials and the people of Indonesia today.

Keywords: Corruption, KPK, Political Law, Corruption Eradication.

How to Cite: Simbolon, N.Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*. 13 (2): 157-177.

PENDAHULUAN

Menurut Robert C Tilman, Korupsi memiliki sejarah yang sangat panjang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Di India, korupsi sudah menjadi permasalahan serius sejak 2300 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya tulisan perdana menteri chandragupta tentang 40 cara untuk mencuri kekayaan negara (Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009). Kerajaan china, pada ribuan tahun lalu telah menerapkan kebijakan yang disebut *Yan-lian*, yaitu hadiah untuk pejabat yang bersih, sebagai inisiatif untuk menekan korupsi. 7 (tujuh) abad lalu, Dante menyatakan bahwa para koruptor akan tinggal di kerak negara dan Shakespeare mengangkat tema-tema korupsi dalam berbagai karyanya.

Plato dalam bukunya *the laws* menyatakan bahwa :“ *the servants of the nations are to render their service without any taking of presents,.....to form your judgment and the abide by it is no easy task, and its a man” surest course to give? Loyal obedience to the law which commands, “Do no service for a present”*.

Di Indonesia, praktik korupsi terjadi sejak zaman kerajaan, bahkan VOC bangkrut di awal abad 20 akibat korupsi yang terjadi di organisasi VOC. Kultur korupsi berlanjut sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada masa

pemerintahan orde lama sampai orde baru. Menurut Amich Alhumami bahwa korupsi pada dasarnya sulit untuk dirumuskan karena ada pemahaman yang berlainan pada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Korupsi yang didefinisikan oleh otoritas penegak hukum;
- 2) Korupsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat;
- 3) Korupsi yang dipersepsi dan diinterpretasikan oleh masyarakat umum yang kemudian berkembang menjadi opini publik (Alhumami, 2011).

Pemahaman mengenai korupsi pada tiga tingkatan ini bisa saja saling, berbeda sehingga melahirkan kontroversi, seperti terlihat dalam banyak kasus korupsi yang diberitakan oleh media massa. Kontroversi mengenai korupsi muncul diberitakan oleh media masa karena dua hal, yaitu (Hamzah, 2012):

- 1) Kepentingan politik tertentu (propaganda untuk menyerang), defamasi, dan merusak kredibilitas lawan politik;
- 2) Terdapat pemahaman, persepsi dan interpretasi yang berlainan mengingat definisi korupsi dirujuk tidak sama.

Praktek korupsi pasti terkait dengan pihak-pihak lain di luar struktur pemerintahan. Korupsi setidaknya melibatkan kerjasama antara dua pihak,

pejabat yang memangku kekuasaan di lembaga publik dan pebisnis yang berada di sektor swasta (Hamzah, 2012). Bentuk korupsi beraneka ragam diantaranya (Alhumami, 2011):

- a. Pengambilan dana publik yang menjadi sumber pendapatan negara;
- b. Penggelapan Pajak;
- c. Pemotongan alokasi anggaran pembangunan;
- d. Permintaan komisi untuk proyek-proyek yang didanai pemerintah;
- e. Penyuaan untuk memuluskan proses legislasi, pembuatan kebijakan publik, persetujuan Anggaran Belanja Negara dan lainnya.

Menurut Hasbullah F Sjawie bahwa seperti penyakit korupsi begitu menggerogoti berbagai anggota tubuh negeri Indonesia, dan tampaknya sudah sampai pada tahapan stadium akhir. Kapan mulai dideritanya, bangsa Indonesia mungkin lupa mencatatnya. Siapa yang memulainya untuk pertama kali seperti juga tidak tercatat dengan baik oleh sejarah (Swajie, 2013).

Sampai saat ini, pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan belum mampu memberikan akibat yang signifikan untuk mencegah

apalagi memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan, terus ditemukannya praktik korupsi di Indonesia. Penangkapan, dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia semakin bertambah baik di pusat maupun di daerah, di instansi pemerintahan dan juga korporasi (Sjawie, 2015), serta di dalam struktur pemerintahan terkecil yakni desa. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan efektif dan maksimal.

Di era kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 ini, diharapkan penegakan kasus korupsi dapat terus di maksimalkan. Selama ini, penegakan hukum atas kasus korupsi di Indonesia menjangkau lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif serta melibatkan juga sektor swasta. Korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga negara tersebut terkait dengan proses tender atas proyek-proyek di institusi tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti swasta yang memiliki kepentingan untuk memenangkan tender atas proyek pemerintah yang kemudian melobi para birokrat dan anggota legislatif untuk mendukung pihak swasta untuk mendapatkannya.

Dalam beberapa kasus aliran dana dari publik (pihak swasta) kepada birokrat dan atau legislatif dapat terjadi sebelum proses tender atau penentuan pemenang tender dilakukan. Aliran dana ini sering disebut sebagai uang pelicin. Dengan demikian, APBN (termasuk APBN-P) merupakan lahan dan sumber dana yang akan dikorupsi. Dua pihak yang dekat dengan penyusunan APBN adalah legislatif dan birokrat.

Di dalam sistem pemerintahan dapat dikatakan bahwa korupsi memberikan dampak buruk dalam tatanan demokrasi dan tata pemerintahan Indonesia. Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengkajian mengenai status lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019?
2. Bagaimana kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Politik hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menanggulangi Kasus Korupsi di Indonesia pasca Revisi UU No. 20 tahun 2001 adalah penelitian hukum normative (Marzuki, 2009). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis permasalahan dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan (Diantha, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019

Praktik korupsi yang tidak terkendali dan terkontrol akan memberikan dampak yang luas dalam sistem pemerintahan sebuah negara, efek domino dan masa depan dari perbuatan korupsi akan mampu melumpuhkan pemerintahan suatu negara. Untuk menghindari keburukan yang akan terjadi tersebut, Pemerintah Indonesia pasca reformasi membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi khusus untuk

menciptakan keadaan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan amanah Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU No. 31 tahun 1999 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang akhirnya diwujudkan melalui UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kedudukan KPK menurut UU No. 30 tahun 2002 bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 2 dan Pasal 3).

Menurut UU No. 30 tahun 2002 di dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pemberantasan tindak korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi di Indonesia meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat setiap tahun baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Djaja, 2008).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti masih mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002 diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada :

a. Kepastian Hukum

Asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Keterbukaan

Asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kepentingan Umum

Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

e. Proporsionalitas

Asas ini mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Asas yang ada pada Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002 menjadi pondasi/dasar bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan sama dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, KPK termasuk lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya KPK melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan undang-undang.

UU No. 30 tahun 2002 merupakan *lex specialis* karena mengatur keadaan yang

husus lembaga pemberantasan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sama halnya dengan UU Tipikor yang menjadi khusus (*lex specialis*) karena mengatur ketentuan khusus yang tidak diatur dalam KUHPidana seperti tindak pidana korupsi, serta ancaman dalam UU Tipikor lebih berat dan tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) (Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016).

Sejak disahkannya revisi atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka saat ini Kewenangan KPK tidak sekuat sebelumnya. Ada indikasi pelemahan terhadap kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum. Dengan berbagai alasan hukum dan politik yang dengan sistemik dibuat oleh para anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) salah satunya adalah, bahwa selama ini institusi KPK melaksanakan tugas dan fungsinya tidak ada pengawasan sehingga dibutuhkan Dewan Pengawas agar tidak terjadi kewenangan mutlak di tubuh KPK.

Berdasarkan analisis dari Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap RUU yang disahkan DPR tanggal 17 september 2019 telah mengidentifikasi 26 persoalan yang beresiko terhadap kinerja KPK kedepan yaitu (KPK, 2019):

1. Pelemahan Independensi KPK;

- a. KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif;
 - b. Rumusan UU hanya mengambil sebagian dari Putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*.
 - c. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya;
2. Bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus;
 3. Dewan Pengawas lebih berkuasa dari pada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan;
 4. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas?
 5. Standar larangan Etik, dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.
Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga:
 - i. Dewan Pengawas tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya;
 - ii. Dewan Pengawas Tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK;Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK;
 6. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun;
 7. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan *pro justitia* dalam pelaksanaan tugas penindakan;
 8. Salah satu Pimpinan KPK setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat

- karena tidak cukup umur (kurang dari 50 tahun);
- a. Terdapat ketidakcermatan pengaturan untuk usia Pimpinan KPK minimal 50 tahun, padahal keterangan dalam kurung tertulis “empat puluh” tahun (Pasal 29 huruf e);
 - b. Alasan UU tidak berlaku surut terhadap 5 Pimpinan yang terpilih tidak relevan, karena Pasal 29 UU KPK mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat.
 - c. Pengangkatan Pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden. Jika sesuai jadwal maka pengangkatan Pimpinan KPK oleh Presiden baru dilakukan sekitar 21 Desember 2019, hal itu berarti UU Perubahan Kedua UU KPK ini sudah berlaku, termasuk syarat umur minimal 50 tahun.
 - d. Jika dipaksakan pengangkatan dilakukan, terdapat resiko keputusan dan kebijakan yang diambil tidak sah.
9. Pemangkasan kewenangan Penyelidikan
- a. Penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke Luar Negeri.
 - b. Hal ini berisiko untuk kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat penyelidikan berjalan;
10. Pemangkasan kewenangan Penyadapan
- a. Penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan
 - b. Penyadapan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi. Jika UU ini diberlakukan, ada 6 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu:
 - (1) Dari penyelidik yang menangani perkara ke Kasatgas
 - (2) Dari Kasatgas ke Direktur Penyelidikan
 - (3) Dari Direktur Penyelidikan ke Deputy Bidang Penindakan
 - (4) Dari Deputy Bidang Penindakan ke Pimpinan
 - (5) Dari Pimpinan ke Dewan Pengawas
 - (6) Perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu
 - c. Terdapat risiko lebih besar adanya kebocoran perkara dan lamanya waktu pengajuan penyadapan, sementara dalam penanganan kasus korupsi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan, terutama dalam kegiatan OTT.
11. OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK
12. Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi, yaitu: Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa KPK bertugas melakukan:

tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini sering kita dengar diungkapkan oleh sejumlah politisi agar ketika KPK mengetahui ada pihak-pihak yang akan menerima uang, maka sebaiknya KPK “mencegah” dan memberitahukan pejabat tersebut agar tidak menerima suap.

13. Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK

- a) Terdapat ketentuan pemusnahan seketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun tidak jelas indikator terkait dan tidak terkait, ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang menentukan ketidakterkaitan tersebut;
- b) Ada ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan penyadapan atau menyimpan hasil penyadapan tersebut;
- c) Ancaman pidana diatur namun tidak jelas rumusan pasal pidananya.

14. Ada risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus;

- a) Di satu sisi UU meletakkan KPK sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap

Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi;

- b) Namun di sisi lain, jika Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, ada risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri;

15. Berkurangnya kewenangan Penuntutan.

Hal ini terlihat dalam Pasal 12 (2) tidak disebut kewenangan penuntutan. Hanya disebut, “dalam melaksanakan tugas penyidikan”, padahal sejumlah kewenangan terkait dengan perbuatan terhadap terdakwa. Kemudian, norma yang diatur tidak jelas dan saling bertentangan. Di satu sisi mengatakan hanya untuk melaksanakan tugas penyidikan, tapi di sisi lain ada kewenangan perlakuan tertentu terhadap terdakwa yang sebenarnya hanya akan terjadi di penuntutan;

16. Dalam pelaksanaan penuntutan, KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.

17. Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN;

18. Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat risiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang

- selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN;
19. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara. Dapat membuat KPK sulit menangani kasus-kasus korupsi besar seperti: e-KTP, BLBI, Kasus Mafia Migas, korupsi pertambangan dan perkebunan, korupsi kehutanan dan kasus lain dengan kerugian keuangan negara yang besar. Dibandingkan dengan penegak hukum lain yang mengacu pada KUHP, tidak terdapat batasan waktu untuk SP3, padahal KPK menangani korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum.
20. Diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, seperti: Perlunya izin untuk memeriksa pejabat tertentu. Pasal 46 UU KPK yang baru terkesan menghilangkan sifat kekhususan (*lex specialis*) UU KPK, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusnya dihadapi dengan cara-cara dan kewenangan yang luar biasa;
21. Terdapat pertentangan sejumlah norma, seperti: Pasal 69 D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas dibentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di Pasal II diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
22. Hilangnya posisi Penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, apakah Penasihat menjadi Dewan Pengawas atau Penasihat langsung berhenti saat UU ini diundangkan;
23. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik (pasal 11). Sesuai dengan putusan MK nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, kewenangan ini adalah wujud peran KPK sebagai *trigger mechanism* bagi aparat penegak hukum lain, untuk dalam keadaan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang serta melakukan tindakan yang diperlukan dalam penanganan perkara korupsi oleh kepolisian atau Kejaksaan yang proses pemeriksaan yang tidak kunjung selesai, tidak memberikan kepastian hukum yang meresahkan masyarakat;
24. KPK hanya berkedudukan di ibukota negara. KPK tidak lagi memiliki harapan untuk diperkuat dan memiliki perwakilan daerah. Dengan sumber daya yang tersedia saat ini dan wilayah kerja seluruh

Indonesia KPK dipastikan akan tetap kewalahan menangani kasus korupsi di seantero negeri.

25. Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan.

Keluhan selama ini tidak adanya sanksi tegas terhadap Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur. Kendala pencegahan selama ini ketika rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti juga tidak terjawab dengan revisi ini. Seharusnya ada kewajiban dan sanksi jika memang ada niatan serius memperkuat kerja pencegahan KPK;

26. Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu: pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan disarankan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan.

Menurut KPK, dua puluh enam (26) poin tersebut berisiko melemahkan atau melumpuhkan kerja KPK. Karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan

tugas selama ini. Jadi, jika ada pihak-pihak yang mengatakan revisi UU KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan, dilihat dari 26 poin di atas hal tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Selain itu terdapat ketidaksinkronan antar pasal, hingga menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menyulitkan KPK dalam penanganan perkara korupsi ke depan. Hal inilah yang kami sampaikan sejak awal, jika proses penyusunan sebuah UU lebih terbuka, melibatkan publik, mendengar masukan instansi terkait seperti KPK dan tidak terburu-buru, maka beberapa resiko persoalan hukum ini bisa diminimalisir (KPK, 2019).

Berdasarkan RUU KPK yang telah disahkan tersebut, pada akhirnya, KPK berhasil dilemahkan kewenangannya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen yang merdeka dan punya kewenangan penuh untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sebagai organ negara yang mulanya memiliki kekhususan (*lex specialis*) yang diatur oleh UU khusus akhirnya UU yang mengaturnya tidak memiliki kekhususan yang diisi dengan kewenangan, hanya bersifat khusus dalam hal tertentu saja.

Berdasarkan kondisi saat ini, langkah politik hukum pemberantasan korupsi oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi pasca tantangan yang dihadapi masyarakat disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah bersangkutan. Dalam masyarakat dengan melakukan uji materil UU No. 19 sederhana, pola penegakan hukumnya tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai dilaksanakan melalui prosedur dan bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) mekanisme yang sederhana pula. Dalam agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabannya masyarakat modern yang bersifat rasional melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dan memiliki tingkat spesialisasi dan dalam melakukan tindakan-tindakan diferensiasi yang begitu tinggi, penanggulangan kasus korupsi di Indonesia pengorganisasian penegakan hukumnya saat ini tidak hanya mengedepankan upaya menjadi begitu kompleks dan sangat preventif tetapi juga represif tetap menjadi birokratis (Pradijongo, 2010).

fokus penegakan hukum oleh KPK. KPK tetap Menurut Bambang Sutiyoso bahwa melakukan langkah-langkah penyidikan secara umum, faktor-faktor yang terhadap dugaan kasus korupsi yang di setiap mempengaruhi penegakan hukum dapat badan penyelenggaraan pemerintahan baik di dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-pusat maupun daerah. KPK dapat melakukan faktor yang terdapat dalam sistem hukum uji publik terhadap kinerja KPK agar publik dan faktor-faktor di luar sistem hukum. atau masyarakat dapat mendukung kinerja Faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi KPK saat ini. faktor hukumnya atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor sarana maupun prasarana. Sedangkan faktor di luar sistem hukum yaitu faktor kesadaran hukum, masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara (Sutiyoso, 2004).

Kendala Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia Saat Ini

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor-faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-

Realitas masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi tidak dapat dipisahkan oleh kemajemukan kondisi Indonesia. Dengan demikian, kondisi penegakan hukum yang masih buruk, termasuk pemberantasan korupsi di

Indonesia saat ini dipengaruhi oleh Menurut Satjipto Rahardjo, beberapa faktor diantaranya: perundang-undangan yang terburu-buru

1. Faktor Hukum atau peraturan (sweeping legislation) akan memberikan dampak untuk memodernisasi masyarakat

Faktor hukum terkait dengan dengan segera, berhadapan dengan beberapa hal yaitu: masyarakat pada umumnya diwarisi

a. Konsistensi asas-asas atau dengan otiranisme, paterlianisme, prinsip-prinsip antara suatu asas partikularisme, dan banyak dengan asas lainnya tidak saling ketidakteraturan lainnya (Raharjo, 1990).

menegaskan atau bertentangan; 2. Sumber Daya Aparatur Penegak

b. Proses perumusannya Hukum

memperhatikan kecenderungan Aparatur penegak hukum ini hukum kebiasaan yang berlaku di merupakan faktor kunci, karena masyarakat, penyusunannya terlaksannya proses penegakan hukum cukup demokratis cukup dengan berada di tangan aparaturnya penegak hukum. memperhatikan aspirasi Kualitas penegakan hukum yang masyarakat yang berkembang; dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum

c. Tingkat kemampuan hukum itu akan mempengaruhi hasil dari proses sendiri dalam operasionalisasinya penegakan hukum di Indonesia, khususnya sebab tidak jarang ada sejumlah terhadap persoalan korupsi.

undang-undang yang tidak Profesionalisme dari penegak operasional, baik antara hukum merupakan sesuatu yang mutlak konsepnya yang tidak jelas juga harus dilakukan dalam menghadapi realitas karena keharusannya untuk sosial dan hukum dalam penegakan kasus ditindaklanjuti dengan aturan korupsi di Indonesia. Negara telah pelaksanaan yang acapkali terlalu dirugikan triliyunan dari perbuatan korupsi lama, sehingga walaupun seperti Kasus Jiwasraya, Kasus Dana BLBI, kemudian ada aturan dan lainnya.

pelaksanaannya, pada akhirnya Saat ini, profesionalisme penegak sudah tidak relevan lagi dengan hukum khususnya dalam kasus korupsi perkembangan yang ada. diperlukan dalam semua tingkatan atau

level aparaturnya penegak hukum seperti, generasi muda di sekolah-sekolah atau penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. instansi pendidikan sudah seharusnya

3. Sarana dan Prasarana

Faktor ini berhubungan dengan aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberantas kejahatan khususnya kasus korupsi. Terpenuhinya sarana dan prasarana seperti alat atau teknologi modern untuk penyidikan kasus korupsi akan membantu para penyidik korupsi menemukan tersangka kasus korupsi. Selain itu, aparaturnya penegak hukum harus melakukan kerjasama dengan penegak hukum negara lain sebagai bagian dari studi banding kinerja penegak hukum khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

4. Faktor Sosial/Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama tidak mudah untuk mempersamakan persepsi sehingga budaya hukum dari masyarakat di masing-masing daerah akan berbeda. Sehingga berdampak pada kepatuhan terhadap hukum dari masyarakat.

Pemerintah Indonesia harus membentuk dan mengarahkan budaya hukum yang patuh kepada seluruh rakyat Indonesia yang dapat dilakukan dengan jargon-jargon atau himbauan dari setiap pemerintah baik di pusat ataupun di daerah. Pendidikan anti korupsi kepada setiap

menjadi kurikulum wajib agar membentuk mentalitas generasi muda yang anti korupsi.

5. Faktor Politik

Pemberantasan kasus-kasus korupsi tidak dapat dipisahkan dari politik pemerintahan yang sedang berlangsung atau rezim pemerintahan yang sedang menjabat. Politik hukum pemerintah yang sedang berkuasa sangat berpengaruh pada penegakan hukum khususnya kasus-kasus korupsi.

Komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk mendukung atau malah sebaliknya dalam penegakan hukum korupsi akan terlihat dari produk-produk hukum yang dikeluarkan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkait dengan keuangan negara yang akan membuka pintu-pintu korupsi bagi pejabat negara.

Tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penegakan hukum yang tebang pilih, monopoli kegiatan ekonomi, serta pelayanan publik yang buruk dalam pemerintahan Indonesia akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia.

a) Kendala Terkait Putusan Hakim

Dari sisi penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia, pendekatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK berpijak pada

pendekatan represif. Akan tetapi setelah tantangan bagi lembaga penegak hukum, kasus-kasus korupsi dilakukan proses terutama bagi pengadilan untuk persidangan hingga putusan oleh menetapkan perhitungan denda dan pengadilan, tidak membawa dampak pembayaran uang pengganti kepada para signifikan bagi keuangan negara. Uang hasil pelaku tindak pidana korupsi agar dari sisi pengembalian dari pelaku korupsi tidak keadilan, kepastian dan manfaat atas pernah dipublikasi secara detail kepada hukum yang diterapkan dapat maksimal publik, sehingga setelah kasus korupsi dan optimal.

disidangkan, dan terpidanannya dikenakan Dalam kerangka konsep hukuman, maka kasus-kasus tersebut telah pemerintahan, sudah seyogyanya selesai. pemerintah melakukan upaya-upaya

Menurut Mahrus Ali, Kerugian pencegahan terhadap keadaan negara akibat tindak pidana korupsi begitu pemerintahan yang mengalami besar jumlahnya, sedangkan jumlah pidana ketidakstabilan. Beberapa upaya yang dapat denda dan pembayaran uang pengganti dilakukan adalah, melakukan reformasi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku yang berdimensi restrukturisasi, tindak pidana korupsi tidak sebanding lurus revitalisasi, dan refungsionalisasi sampai dengan kerugian yang diderita negara (Moh. kepada melahirkan konsep tentang Mahfud MD, dkk, 2013). Akibatnya, terlalu *reinventing* (mewirauahakan) dan banyak sumber daya yang dihabiskan *banishing bureaucracy* (memangkas negara untuk memberantas korupsi yang birokrasi) dalam sistem ekonomi dan dari tahun ke tahun baik dari segi kualitas pemerintahan yang dilaksanakan maupun kuantitas mengalami peningkatan. berdasarkan asas-asas *good governance* Kondisi ini diperparah oleh praktik (Sedarmayanti, 2007).

putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menggunakan metode b) Kendala dari perspektif norma Negara memandang bahwa konvensional dalam menghitung kerugian perbuatan atau tindak pidana korupsi telah keuangan negara. Kerugian keuangan masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana negara hanya dimaknai sebagai kerugian korupsi yang selama ini terjadi secara yang secara langsung dinikmati pelaku meluas, tidak hanya merugikan keuangan tindak pidana korupsi (Moh. Mahfud MD, negara dan daerah, tetapi juga telah dkk, 2013). Hal ini menjadi sebuah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka, Negara mengeluarkan beberapa produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan kesimpulan dari undang-undang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung di dalamnya antara lain (Prinst, 2002):

- 1) Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau Non-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

- 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 4) Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).
- 5) Menyuap PNS atau penyelenggara negara (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).
- 6) Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
- 7) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

Oleh karena itu, keberadaan produk regulasi yang diberikan Negara untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi, sangatlah dituntut kepada para aparat penegak hukum lainnya untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di setiap pasal yang ada agar tepat dalam menerapkan kepada para pelaku. Selain itu juga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang sangat jitu dan tepat. Karena, penerapan sanksi normatif mengenai korupsi kepada para pelakunya tidak akan bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana tidak diikuti juga beberapa strategi (Satria, 2009).

Ada 3 hal yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, anatara lain; (1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, (2) menaikkan moral pegawai tinggi, serta (3) legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal (Satria, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa persoalan korupsi tidak dapat dituntaskan hanya dengan pembentukan hukum semata, tanpa melihat aspek keuangan, permasalahan ekonomi dan permasalahan politik yang semuanya merupakan sebuah kesatuan yang saling terkait.

Kendala eksternal merupakan kendala yang timbul dari luar instansi KPK seperti pengaruh politik kekuasaan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu:

a) Pengaruh Politik Kekuasaan Pemerintah

Saat ini KPK dengan segala keterbatasan kewenangan setelah RUU KPK disahkan yakni dengan UU No. 19 tahun 2019, maka akan berpotensi menghambat kinerja KPK saat ini. KPK akan terkendala dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yakni:

Pengaruh atau dominasi kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) terhadap KPK terlihat dengan pembentukan UU No. 19 tahun 2019. Hal ini merupakan agenda politik tersembunyi dari Pemerintah dan DPR terhadap melemahkannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tuntutan masyarakat kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tidak ditanggapi oleh Presiden merupakan bentuk dukungan Presiden terhadap pelemahan insttusi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia yang saat ini masih kredibel dan masih memiliki kepercayaan masyarakat.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang ditimbulkan dari unsur dalam diri atau internal KPK seperti, kedudukan KPK, Kewenangan KPK serta Fungsi dan Tugas KPK yang telah dilemahkan melalui UU KPK yang terbaru (UU No. 19 tahun 2019) sehingga kinerja dari KPK saat ini menjadi minim dan tanpa dasar (pondasi) kewenangan yang penuh. Hal ini memperlemah keadaan KPK untuk melakukan penyeledidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Dipilihnya orang-orang yang tidak kredibel, kompeten, dan diragukan independensinya ke dalam institusi KPK. Hal ini terlihat jelas dari rekam jejak para calon komisioner KPK periode 2019 lalu. Secara politik, Presiden Jokowi telah mendesain dari mula pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner KPK.

2. Faktor Eksternal

Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwa proses pemilihan dan puluhan Guru Besar dari berbagai Komisioner KPK saat ini terdapat 3 universitas di Indonesia. Akan tetapi persoalan besar yakni: masukan tersebut juga tidak diakomodir,

1) Rekam Jejak Buruk di Masa Lalu.

Salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik, hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan

yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik. Sebelumnya, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, persoalan pencalonan Komisioner KPK sudah menjadi sorotan publik.

2) Pimpinan KPK Terpilih Tak Patuh LHKPN

Masih terdapat Pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK. Padahal ini merupakan mandat langsung dari Undang-undang No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi.

3) Masukan Publik Tak Didengar

Gerakan dari elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi Pimpinan KPK kali ini. Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny,

Pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, baik oleh Pansel, Presiden, maupun DPR. Sehingga dapat dikatakan bahwa seleksi Pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas (Tim Detikcom, 2019).

b) Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat

Saat ini, di Indonesia dapat dikatakan bahwa pengaruh budaya (kultur) dan perilaku ASN dan Pejabat Publik yang tidak taat asas dan hukum menjadi permasalahan yang sudah menyeluruh. Tidak sedikit dijumpai pelanggaran administrasi oleh ASN sebagai bentuk awal dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu, mengutip pendapatnya Jhon Rawls bahwa struktur hukum, substansi, dan *culture* (budaya) merupakan satu unsur penting dalam membentuk sistem hukum yang baik dalam sebuah negara (Ali, 2009).

Penegakan hukum di Indonesia

tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan hukum, fasilitas, serta mentalitas ASN dan Pejabat Negara serta Aparatur Penegak Hukum. Faktor kesadaran dari penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan

masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing.

Unsur personal (individu) menjadi paling menentukan dalam corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the humanbeing that counts*. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya (Oksep Andhayanto, Pery Rehendra Sucipta, & Irman, 2017). Oleh karena itu perihalan mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, *"the moral of the man"* menjadi sangat penting bagi penegakan hukum khususnya terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Menurut Friedman, budaya menjadi faktor penentu berhasil tidaknya sistem hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, jika struktur dan substansi sudah jelas kedudukan dan materinya, maka kultur dari pemerintah dan masyarakat harus didudukkan kembali. Pemerintah selaku aparat negara yang melaksanakan pemerintahan harus memiliki mental ideologi yang baik dan sikap yang jujur, sehingga dalam mengelola negara dan pemerintahan tidak terjadi KKN. Serta masyarakat, harus mampu mendukung dan mengembangkan sikap kritis, mau terlibat

serta mendukung penuh arah pembangunan nasional. Akhirnya kultur antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik dan akan secara bersama-sama menguatkan pembangunan nasional Indonesia (Syaputra, 2019).

Terkait dengan kedudukan KPK, saat ini dukungan penguatan menjadi agenda mendesak. Sebagai salah satu titik sentral dalam memberantas korupsi, dukungan optimal dari pemerintah sangat dibutuhkan. Segala keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya menurut Saldi Isra segera menjadi agenda dan harus dipecahkan oleh pemerintah agar KPK bisa bekerja lebih optimal menguraji praktik korupsi di Indonesia (Isra, 2016). Dalam negara dengan praktik korupsi yang tinggi dan masif, maka dukungan pemerintah dan parlemen menjadi tambahan energi yang luar biasa bagi KPK dalam memberantas korupsi khususnya di Indonesia.

SIMPULAN

Politik hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 Tahun 2019 yang notabannya

melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK.

Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 Tahun 2019. Faktor eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, A. (2011). Korupsi, Kekuasaan, dan Patronase Politik, dalam Analisis CSIS. *Centre For Strategic and International Studies*, 66.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I. M. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis UU No. 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 versi UU No. 30 tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, F. (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik. Yayasan FAHAM Indonesia*, 34.
- Isra, S. (2016). *Hukum yang Terabakan: Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*. Jakarta: Kompas.
- KPK. (2019). *KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisiko-melemahkan-di-ruu-kpk>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud MD, dkk. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Oksep Andhayanto, Pery Rehendra Sucipta, & Irman. (2017, Oktober). Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem). *Jurnal Selat*, 5, 57.
- Pradijongo, K. T. (2010). *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (1990). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Satria, M. (2009, Mei 09). *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Normatif*. Seminar Nasional tentang Anti Korupsi, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Coporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sutiyoso, B. (2004). *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Swajie, H. F. (2013). *Meneruskan Budaya Korupsi*. Jakarta: Dalam Media Indonesia.
- Syaputra, M. Y. (2019). Penguatan Haluan Negara sebagai Arah Pembangunan Nasional Indonesia Dilihat dari Teori Sistem Hukum. In M. T. Fitriani, *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara Antara Realita dan Cita-cita* (p. 228). Medan: CV. Enam Media.
- Tim Detikcom. (2019). *Persoalan dari Pimpinan KPK Baru: Rekam Jejak Bermasalah, Tak Patuh LHKPN*. Jakarta: Detikcom. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4705090/persoalan-dari-pimpinan-kpk-baru-rekam-jejak-bermasalah-tak-patuh-lhkpn>

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengrupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.